

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Rudy Badrudin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: rudy.badrudin@stieykpn.ac.id

ABSTRACT

This research analyzed the influence of region autonomy on developing region strategy in 29 regencies and 6 cities in Central Java Province based on the data of year 2001 to 2008. The method used to analyze the hypotheses were Klassen Typology, BCG matrix, and hypothesis test for means: two-sample assuming equal variances. The results showed that contribution and growth of Gross Domestic Regional Product had significant difference between regencies and cities in Central Java Province so that each regencies and cities have to choose the strategy of region development.

Keywords: region autonomy, klassen typology, BCG matrix

JEL classification: H76, I31, 043

PENDAHULUAN

Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi. Ketidakmerataan terjadi pada kegiatan pem-bangunan, distribusi pendapatan, spasial atau antarwilayah, sektoral, dan regional.

Ketidak-merataan ini bukanlah sebagai akibat semata-mata pembangunan yang dilaksanakan tetapi juga merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan sebagai suatu strategi pembangunan. Hal ini terkait dengan tujuan perencanaan pembangunan di Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara industri, sehingga sektor industri yang dipilih sebagai sektor unggulan. Ketidakmerataan di Indonesia lebih disebabkan karena strategi pembangunan dalam era Pembangunan Jangka Panjang yang lebih bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi daripada pemerataan hasil pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai ketidakmerataan hasil pembangunan nampaknya menjadi suatu kecenderungan yang terjadi di beberapa negara sedang berkembang. Fenomena yang kontradiktif antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ketidak-merataan pembangunan yang terjadi di negara sedang berkembang sejalan dengan teori yang dikemukakan Simon Kuznets dengan *inverted U curve*. *Inverted U curve* menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan akan ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Kondisi tersebut akan berlangsung sampai pada titik krisis tertentu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan.

Kini, dua belas tahun sudah otonomi daerah

telah berjalan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Bahkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah per 1 Januari 2001, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah masing-masing telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan perundangan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. Penggantian kedua undang-undang tersebut dimaksudkan agar dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah lebih sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah provinsi dengan kota/kabupaten dan antara daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada. Pada strategi pengembangan wilayah yang dipilih, semuanya membutuhkan kerjasama antar *stakeholders*.

Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan. Dalam kenyataannya, berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan *microorganizational abilities of governments* di tingkat daerah, yaitu bentuk reformasi manajemen

publik yang harus diperhatikan pemerintah dan tidak semata membenahi *macroorganizational capacities* di tingkat pusat. Dengan demikian, kerjasama antarpemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang keberhasilan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis, strategi pengembangan wilayah melibatkan berbagai pemahaman mendasar tentang potensi dan peluang daerah dan berhubungan dengan peningkatan kapasitas para aparat daerah, wakil rakyat, pengusaha, dan warga daerah secara umum. Potensi *leadership* para pemimpin daerah dan kemampuan manajerial seorang pemimpin di birokrasi, parlemen, dan dunia usaha di daerah sampai pada kesiapan para *stakeholders* melaksanakan pembangunan daerah menjadi faktor dominan dalam kinerja pengembangan ekonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi ekonomi, pengembangan ekonomi daerah merupakan suatu keniscayaan belaka karena sukar sekali diharapkan suatu pengembangan ekonomi yang dapat kompatibel dengan kebutuhan dan potensi daerah apabila nuansa sentralistik masih terlalu kental (Hirawan, 2007:3). Teori ekonomipun mengajarkan bahwa konsep desentralisasi ekonomi itu tidak lain adalah tuntutan efisiensi dan skala ekonomi yang lebih adil antara pusat dan daerah, sehingga lebih menguntungkan secara ekonomi dan sosial dalam skala yang lebih makro.

Selama dua belas tahun penyelenggaraan otonomi daerah, telah terjadi pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang sangat luar biasa banyaknya. Pemekaran wilayah dari tahun 2001 telah melahirkan 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota baru. Harapan masyarakat di daerah hasil pemekaran wilayah menjadi lebih sejahtera belum terbukti karena banyaknya kasus korupsi. Menurut penelitian Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM telah ditemukan indikasi korupsi di daerah hasil pemekaran di Provinsi Banten (593 kasus), Kepulauan Riau (463 kasus), Maluku Utara (184 kasus), Kepulauan Bangka Belitung (173 kasus), Sulawesi Barat (168 kasus), Gorontalo (155 kasus), dan Papua Barat (147 kasus).

Temuan tersebut diperkuat dengan hasil survei Bank Dunia dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM terhadap 1.815 rumah tangga di tujuh provinsi hasil pemekaran wilayah yang menunjukkan bahwa

pemekaran wilayah semakin menyuburkan praktik-praktik korupsi sehingga menyebabkan inefisiensi dan semakin tidak sejahteranya masyarakat di daerah hasil pemekaran wilayah akibat implementasi desentralisasi

Tabel 1
Rincian Jumlah Kabupaten/Kota Per Provinsi
Sampai Dengan Tahun 2009

No	Provinsi	Jumlah		
		Kabupaten	Kota	Total
1	Nangroe Aceh Darusalam	18	5	23
2	Sumatera Utara	25	8	33
3	Sumatera Barat	12	7	19
4	Riau	10	2	12
5	Jambi	9	2	11
6	Sumatera Selatan	11	4	15
7	Bengkulu	9	1	10
8	Lampung	12	2	14
9	Kep. Bangka Belitung	6	1	7
10	Kep. Riau	5	2	7
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1	5	6
12	Jawa Barat	17	9	26
13	Jawa Tengah	29	6	35
14	Banten	4	4	8
15	Jawa Timur	29	9	38
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	1	5
17	Bali	8	1	9
18	Nusa Tenggara Barat	8	2	10
19	Nusa Tenggara Timur	20	1	21
20	Kalimantan Barat	12	2	14
21	Kalimantan Tengah	13	1	14
22	Kalimantan Selatan	11	2	13
23	Kalimantan Timur	10	4	14
24	Sulawesi Utara	11	4	15
25	Sulawesi Tengah	10	1	11
26	Sulawesi Selatan	21	3	24
27	Sulawesi Tenggara	10	2	12
28	Gorontalo	5	1	6
29	Sulawesi Barat	5	0	5
30	Maluku	9	2	11
31	Maluku Utara	7	2	9
32	Papua	28	1	29
33	Papua Barat	10	1	11
Total Kabupaten/Kota		399	98	497

Sumber: KPPOD, tahun 2009.

fiskal sejak 1 Januari 2001 (Kompas, 2 Agustus 2010). Hampir sepertiga para pimpinan kepala daerah pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di Indonesia menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan keuangan negara. Jumlah kabupaten/kota se Indonesia per provinsi berdasarkan data KPPOD sampai dengan tahun 2009 ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal variabel, lokasi, obyek, waktu, dan alat analisis dalam metode penelitian, penelitian ini menggunakan data panel (*polled data*) tahun 2001-2008 di semua Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipilihnya semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah berdasarkan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2001 sebagai awal dimulainya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sampai dengan sekarang tahun 2011 merupakan provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah di samping Provinsi DKI, Provinsi DIY, dan Provinsi Bali.

Strategi pengembangan wilayah yang dipilih oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan nampak hasilnya pada kinerja perekonomian daerah yang salah satunya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya. Menurut Arsyad (2004:17), pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun yang dinyatakan dalam satuan persen. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi}_{\text{per tahun}} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan: PDRB_t adalah PDRB tahun ke t
PDRB_{t-1} adalah PDRB tahun ke t-1

Berdasarkan rumus pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus mengetahui terlebih dahulu nilai PDRB masing-masing tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (2009a:1-10), PDRB di Indonesia dihitung dan

disajikan dengan menggunakan dua metode, yaitu PDRB menurut metode produksi atau lapangan usaha dan PDRB menurut metode penggunaan atau pengeluaran atau belanja.

PDRB menurut metode produksi adalah PDRB yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menurut metode produksi disebut juga sebagai PDRB menurut sektor atau lapangan usaha atau sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi penyediaan (*supply side*). PDRB menurut metode penggunaan adalah PDRB yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah. PDRB menurut metode penggunaan disebut pula sebagai PDRB menurut pengeluaran (*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*) atau sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi permintaan (*demand side*).

Berdasarkan penjelasan tentang otonomi daerah dan strategi pengembangan wilayah khususnya di wilayah yang tidak terjadi pemekaran selama penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia maka mengindikasikan adanya perbedaan antara teori dan konsep mengenai otonomi daerah dan strategi pengembangan wilayah. Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menguji dan menganalisis perbedaan rata-rata kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Pemerintah kabupaten/kota menghadapi perubahan eksternal yang sangat cepat pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001. Perubahan eksternal tersebut mengakibatkan persaingan antarwilayah kabupaten/kota menjadi sangat ketat. Pemerintah kabupaten/kota

yang mampu memilih strategi yang tepat akan dapat memenangkan persaingan tersebut. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat tersebut, pemerintah kabupaten/kota harus mampu menerapkan model manajemen dengan paradigma baru karena dengan paradigma baru, manajemen pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas yang ditujukan untuk memenuhi *customer satisfaction* (kepuasan masyarakat yang menjadi indikator keberhasilan Otonomi Daerah). Paradigma baru diperlukan untuk mengatasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan bagaimana mengelola perubahan tersebut. *Managerial paradigm* menunjukkan cara orang berpikir dan bertindak dalam mengelola pemerintahan kabupaten/kota. Pergeseran paradigma tersebut ditujukan untuk menyediakan *superior customer value* melalui *customer value strategy*, *organizational systems*, dan *continuous improvement*.

Customer value strategy adalah strategi bisnis dari pemerintah kabupaten/kota yang berupa penawaran nilai kepada *customer* yang di dalamnya tidak hanya berupa produk, tetapi juga berupa karakteristik produk, pendistribusian produk, dan sebagainya (Bounds, et al., 1994: 28). *Customer value* adalah kombinasi manfaat yang berasal dari suatu produk dan pengorbanan yang diperlukan *customer* dalam memenuhi kebutuhannya atau selisih antara manfaat yang diperoleh *customer* dari penggunaan produk dengan pengorbanan yang dilakukan *customer* untuk memperoleh manfaat tersebut. Salah satu pergeseran paradigma dari paradigma lama ke paradigma baru dalam *customer value strategy* adalah topik tentang kualitas. Dalam paradigma lama, manajemen mendefinisikan kualitas dengan pencapaian yang telah ditentukan. Kualitas dijamin dengan seleksi produk sebelum dikirim ke *customer*. Manajemen membuat *tradeoff* antara kualitas, biaya, dan skedul. Dalam paradigma baru manajemen mendefinisikan bahwa kualitas produk hanya merupakan salah satu bagian dari *customer value*. Manajemen mencari sinergi antara kualitas, biaya, dan skedul. Untuk memiliki kemampuan bertahan, berkembang, dan memenangkan persaingan yang ketat dalam era bisnis global, organisasi bisnis harus mengarahkan semua kegiatannya untuk menghasilkan *customer value*.

Organizational systems adalah sarana yang

menyediakan *customer value*. Termasuk dalam sistem ini adalah input material dan sumberdaya manusia, teknologi proses, metode operasi dan praktik kerja, aliran aktivitas kerja, aliran informasi, dan proses pengambilan keputusan. Dalam *organizational systems*, ada pergeseran paradigma dalam memandang *cross functional approach*, teknologi, pelibatan karyawan, manajemen sumberdaya manusia, definisi peraturan, kultur, dan struktur. Misalnya, paradigma baru dalam memandang teknologi adalah teknologi digunakan untuk mengurangi kompleksitas masalah terlebih dengan menggunakan teknologi yang otomatis dan serba komputer dan manajemen menggunakan teknologi hanya untuk mengoptimalkan sistem yang menghasilkan *customer value*. Paradigma baru dalam memandang pelibatan karyawan adalah karyawan pemerintah kabupaten/kota dilibatkan dalam kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang berfokus pada strategi untuk memuasi *customer* atau masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dari karyawan pemerintah kabupaten/kota. Pelibatan karyawan dilakukan dengan cara memperdayakannya melalui *continuous improvement*, agar mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah kabupaten/kota dan menghasilkan kepuasan *customer* (Bounds, et al., 1994: 36).

Continuous improvement digunakan untuk mengelola perubahan dalam lingkungan eksternal agar pemerintah kabupaten/kota dapat membuat keadaan menjadi lebih baik. *Improvement* dalam paradigma lama dilakukan yang utama pada pengembangan produk baru dan reaksi terhadap masalah yang muncul. *Improvement* dalam paradigma baru dilakukan pada setiap waktu dan di manapun (Bounds, et al., 1994:48). Manajemen secara proaktif mengadakan perbaikan pada setiap ada kesempatan meskipun tidak ada masalah yang muncul. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan *continuous improvement* secara berkelanjutan terhadap proses dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan *customer value* dengan tingkat *improvement* yang lebih pesat dibandingkan *improvement* yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota pesaing. Intensitas *superior customer value* melalui *customer value strategy*, *organizational systems*, dan *continuous improvement* ditentukan oleh keunggulan masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang dapat dianalisis menggunakan Tipologi Klassen atau dengan matriks pertumbuhan-pangsa pasar

(*growth-share matrix – GS Matrix*) (Widodo, 2006:120-122).

Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 35 (tiga puluh lima) wilayah administratif kabupaten/kota, yang meliputi 29 wilayah kabupaten dan 6 wilayah kota. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah per 1 Januari 2001, masing-masing kabupaten/kota mempunyai hak dalam hal mengatur kebijakan dan arah pembangunan yang lebih mandiri. Hal ini menyebabkan perkembangan kinerja perekonomian wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik ini disebabkan perbedaan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya fisik, sumber daya non fisik (sumberdaya manusia), ataupun sumber modal. Sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah kabupaten/kota menentukan jenis produk/kegiatan yang difokuskan untuk dikembangkan. Pemilihan jenis produk/kegiatan pemerintah kabupaten/kota yang akan dikembangkan didasarkan pada keunggulan yang dimiliki oleh wilayah kabupaten/kota tersebut. Keunggulan dapat diperoleh dari sumberdaya spesifik yang dimiliki. Jika suatu wilayah kabupaten/kota memiliki sumberdaya yang spesifik yang tidak dimiliki wilayah kabupaten/kota lain, baik jenis, mutu, maupun jumlahnya maka wilayah kabupaten/kota memiliki keunggulan memproduksi produk yang menggunakan input utama sumberdaya tersebut. Pemilihan terhadap produk yang memiliki keunggulan untuk dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota, berarti pemerintah kabupaten/kota tersebut melakukan spesialisasi. Spesialisasi dalam kegiatan sektor sangat penting, mengingat sumberdaya yang dimiliki oleh wilayah kabupaten/kota sangat terbatas. Dengan melakukan spesialisasi diharapkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki wilayah kabupaten/kota tidak percuma.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah proses berarti mengandung unsur dinamis, perubahan, atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan wilayah secara absolut. Perbandingan

absolut antar kabupaten/kota yang disebut dengan Tipologi Klassen disajikan dalam bentuk diagram empat kuadran, di mana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horizontal) digambarkan garis lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horizontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran (Gambar 1). Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah).

Apabila suatu kabupaten/kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Apabila terletak di kuadran II, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Suatu titik di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, dengan mudah dapat diinterpretasikan bahwa suatu titik di kuadran IV menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah.

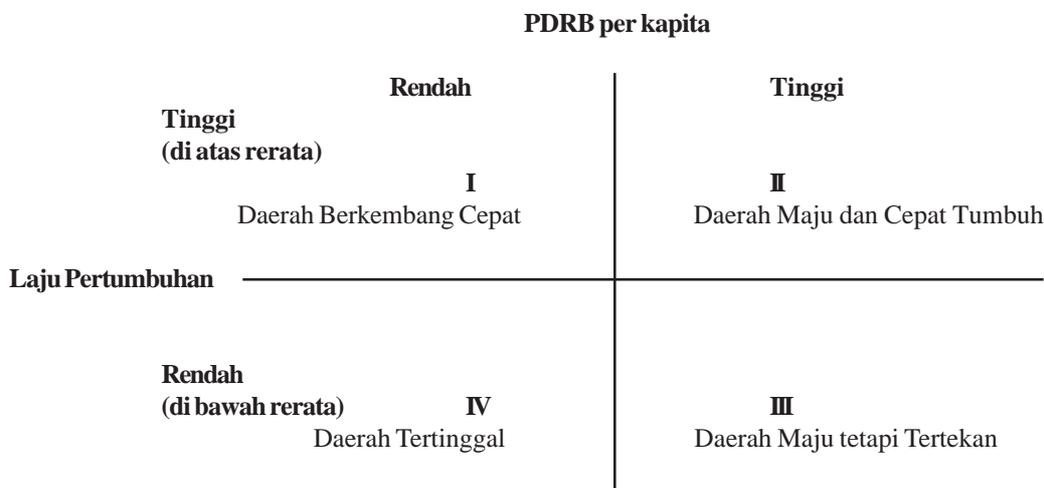
Kabupaten/kota di kuadran I yang disebut daerah berkembang cepat menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya relatif masih rendah sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkannya. Namun demikian, karena tingkat pertumbuhan relatif tinggi maka kabupaten/kota masih berpeluang dipacu untuk mengejar daerah lain. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran II disebut daerah maju dan cepat tumbuh yang secara relatif menunjukkan daerah-daerah sudah maju perekonomiannya dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-

rata Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran III merupakan daerah maju tetapi tertekan secara absolut sudah mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tingkat pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kabupaten/kota yang digambarkan di kuadran IV disebut daerah tertinggal, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya.

Mirip dengan alat Tipologi Klassen yang digunakan untuk mengetahui suatu wilayah kabupaten/kota memiliki keunggulan di antara wilayah kabupaten/kota lain adalah dengan menggunakan matriks pertumbuhan-pangsa pasar (*growth-share matrix – GS Matrix* atau *Boston Consulting Group-BCG Matrix*). *GS Matrix* memiliki empat kuadran yang dipisahkan oleh dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horisontal. Sumbu vertikal menunjukkan kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi dan sumbu horisontal menunjukkan laju pertumbuhan

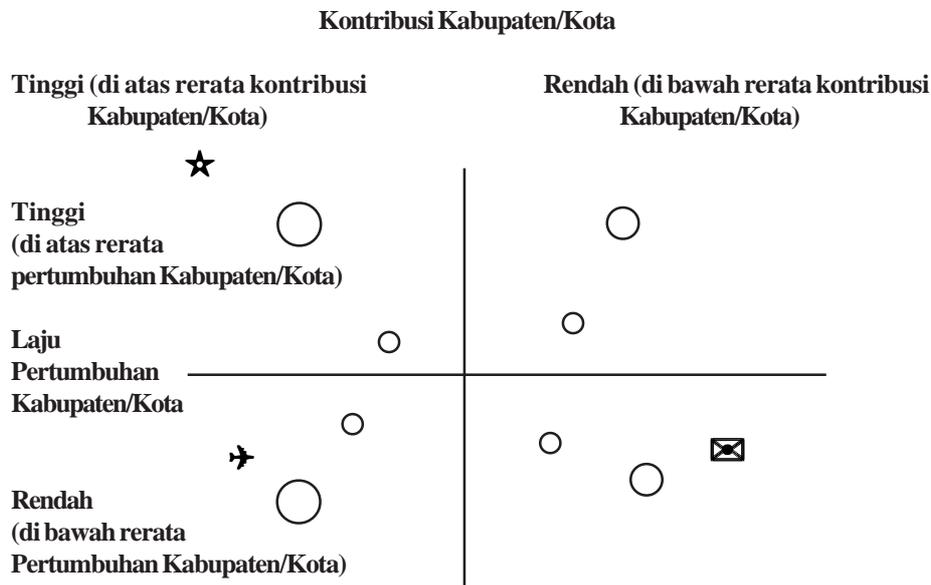
PDRB kabupaten/kota. Kontribusi PDRB kabupaten/kota diukur dari kontribusi nilai PDRB kabupaten/kota tersebut terhadap nilai PDRB provinsi, sedangkan laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota diukur dari persentase perubahan nilai PDRB kabupaten/kota tersebut dari tahun ke tahun.

Lingkaran-lingkaran pada *GS Matrix* menunjukkan kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya kontribusi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi di atas kontribusi rata-rata dikelompokkan ke dalam kabupaten/kota yang memiliki kontribusi tinggi, dan sebaliknya. Demikian juga dengan pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan semua kabupaten/kota dimasukkan ke dalam kelompok kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, dan sebaliknya (Gambar 2).



Gambar 1
Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita (Tipologi Klassen)

Sumber: Bappeda DIY, 2010, *Laporan Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah*.



Gambar 2
Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita (BCG Matrix)

Sumber: Badrudin, 2008.

Pada BCG *matrix*, kabupaten/kota yang terletak pada kuadran satu (bergambar ?) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut mempunyai *share* rendah, tetapi laju pertumbuhan sektor tinggi. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran satu ini memiliki peluang pasar yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tinggi di kabupaten/kota ini. Dengan demikian, kabupaten/kota yang terletak pada kuadran satu ini berpotensi untuk dikembangkan. Strategi pengembangan kabupaten/kota ini adalah dengan menambah modal untuk meningkatkan jumlah produk (PDRB) yang dihasilkan oleh kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran dua (bergambar ☒) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Dengan demikian, kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang memiliki potensi berkembang, karena kabupaten/kota tersebut berada pada pasar yang memiliki laju pertumbuhan

tinggi. Selain itu, kabupaten/kota itu juga memberikan kontribusi tinggi, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi. Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran dua adalah memperbesar permodalan untuk melayani permintaan dari laju pertumbuhan pasar yang tinggi dan berusaha mempertahankan kontribusi yang telah dimiliki.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran tiga (bergambar →) merupakan kabupaten/kota yang berhasil, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi, walaupun laju pertumbuhan relatif rendah. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran tiga tidak memerlukan investasi besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan pasar juga relatif rendah. Jika diinginkan memperbesar investasi di kabupaten/kota tersebut, pemerintah kabupaten/kota harus berusaha menciptakan pasar atau mencari pasar baru bagi produk-produk di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran empat (bergambar *) dapat diartikan bahwa kabupaten/

kota tersebut memiliki potensi yang rendah, karena kabupaten/kota tersebut memiliki pertumbuhan pasar rendah dan memberikan kontribusi yang rendah pula. Kabupaten/Kota tersebut memiliki tingkat keunggulan yang relatif rendah di dalam PDRBnya, sehingga kabupaten/kota tersebut hanya mampu menyerap sebagian kecil permintaan pasar. Investasi pada kabupaten/kota tersebut tidak dapat memberikan prospek yang baik, karena laju pertumbuhan kabupaten/kota tersebut juga rendah. Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran empat adalah dengan melakukan diversifikasi produk untuk menciptakan pasar baru atau mencari pasar di luar pasar yang sudah ada.

Andriani, Lis HR (2001), menggunakan BCG Matrix untuk meneliti 9 (sembilan) PTS di Kota Surabaya yang mempunyai Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dengan status terakreditasi B berdasarkan data Direktori Kopertis Wilayah VII, Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan posisi keunggulan kompetitif masing-masing PTS berdasarkan faktor-faktor keberhasilan kritis internal maupun eksternal yang dimilikinya, serta menentukan strategi apa yang paling sesuai untuk diterapkan berdasarkan posisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis BCG Matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Unika Widya Mandala, UK Petra, dan Ubaya berada pada posisi yang sangat menguntungkan yaitu terletak di kuadran 1, sementara keenam PTS lainnya berada pada kuadran 2, yang berarti memiliki posisi cukup menguntungkan. Kedua, alternatif strategi yang dapat diterapkan untuk masing-masing PTS adalah sebagai berikut: Unika Widya Mandala sebaiknya melakukan strategi pengembangan pasar; Untag, UPB, UPN "Veteran" Surabaya, dan Ubhara dianjurkan untuk menerapkan strategi pengembangan produk; Unitomo dengan strategi integrasi ke belakang; Unipra menggunakan strategi penetrasi pasar; dan UK Petra dan Ubaya sebaiknya melaksanakan strategi integrasi horizontal. Strategi tersebut dapat dijadikan acuan penyusunan strategi jangka panjang dalam rangka pengembangan masing-masing PTS, sehingga diharapkan pengembangannya akan semakin terarah, terfokus, efektif, dan efisien dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Algifari dan Rudy Badrudin (2003), melakukan

penelitian untuk menguraikan strategi yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan keterbatasan sumberdaya untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal. Strategi tersebut berkaitan dengan pengidentifikasian karakteristik lokasi (dalam hal ini kecamatan), kemudian memasukkan kecamatan tersebut ke dalam suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi pembangunan yang cocok bagi masing-masing kelompok kecamatan. Pengelompokan kecamatan dilakukan dengan menggunakan model *Growth-Share* BCG Matrix. Setiap kecamatan diidentifikasi pertumbuhan ekonomi (*growth*) dan kontribusi (*share*) PDRB kecamatan terhadap PDRB kabupaten. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tidak satu pun kecamatan di Kabupaten Sleman yang memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Pakem, Prambanan, dan Turi memiliki kontribusi yang tinggi bagi PDRB kabupaten, namun pertumbuhan ekonominya rendah. Kecamatan Depok, Gamping, Malti, Ngaglik, dan Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kontribusi bagi PDRB kabupaten rendah. Sedangkan kecamatan Berbah, Godean, Kalasan, Minggu, Moyudan, Seyegan, dan Tempel termasuk ke dalam kelompok yang memberikan kontribusi rendah bagi PDRB kabupaten dan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Prasetyo (2004), melakukan penelitian tentang Analisis Penetapan Strategi Perusahaan Guna Meningkatkan Daya Saing Pada PT Cipta Niaga Dengan Analisis SWOT, BCG Matrix, dan analisis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi persaingan bisnis yang sangat ketat seperti saat ini dibutuhkan informasi yang cepat dan metode analisis yang akurat. Pada persaingan yang semakin ketat karena keadaan pasar yang terbuka dan kondisi ekonomi yang belum stabil diperlukan strategi yang tepat untuk melanjutkan kelangsungan perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan PT Cipta Niaga Palembang yang bergerak pada bidang distribusi barang-barang kebutuhan rumah tangga (*customer good*). Sebagai kompetitor, PT A bergerak dalam bidang yang sama. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemasaran dan menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing terhadap perusahaan yang sejenis yang ada pada pasar domestik. Perumusan strategi

perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, BCG Matrix, dan analisis lainnya. Penerapan metode tersebut dilakukan dengan evaluasi dan analisis terhadap keadaan intern dan ekstern perusahaan yang meliputi peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan, kekuatan bisnis, daya tarik industri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kedua perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alternatif strategi untuk masing-masing perusahaan, yaitu untuk PT Cipta Niaga adalah strategi *market growth* dan untuk PT A adalah strategi *market development*.

Badrudin (2008) melakukan penelitian tentang Analisis Dampak Otonomi Daerah terhadap Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menganalisis dampak otonomi daerah terhadap strategi pengembangan perguruan tinggi swasta (PTS) di Kabupaten Sleman dengan sampel empat PTS besar berdasarkan jumlah mahasiswa pada Program Studi (PS) Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan dan lokasi yang saling berdekatan di Kecamatan Depok, yaitu Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN). Penelitian ini dilakukan berdasarkan perkembangan data jumlah mahasiswa baru pasca pemberlakuan otonomi daerah per 1 Januari 2001, yaitu mulai tahun 2002 sampai dengan 2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak otonomi daerah telah menimbulkan penurunan terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di DIY pada umumnya dan Kabupaten Sleman pada khususnya karena di berbagai kota/kabupaten di luar Provinsi DIY telah tumbuh dan berkembang berbagai PT. Oleh karena itu, agar PTS mampu tumbuh dan berkembang maka masing-masing PTS harus memilih strategi pengembangan PTS yang spesifik berbeda bahkan untuk masing-masing PS di masing-masing PTS (Maisyaroh, 2005). Perbedaan rata-rata kontribusi jumlah mahasiswa baru pada PS Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan di UII, UAJY, UPNVY, dan STIE YKPN terjadi karena perbedaan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya fisik, sumber daya non fisik (sumberdaya manusia), ataupun sumber modal. Sumberdaya yang dimiliki oleh suatu PS menentukan jenis produk/kegiatan yang difokuskan untuk

dikembangkan. Tidak adanya perbedaan rata-rata pertumbuhan jumlah mahasiswa baru pada PS Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan di UII, UAJY, UPNVY, dan STIE YKPN karena sebagai PTS yang besar di Kabupaten Sleman, keempat PTS tersebut memiliki keterbatasan dalam memperoleh input (calon mahasiswa) yang relatif sebagian besar berasal dari luar Provinsi DIY.

Berdasarkan uraian tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_1 : ada perbedaan rata-rata kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- H_2 : ada perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sensus dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten/kota, yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan pengambilan data yang runtut dari tahun 2001 sampai dengan 2008, maka data berbentuk *time series*. Berdasarkan jumlah sampel kabupaten/kota sebanyak 35 kabupaten/kota maka data berbentuk *cross section*. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section (pooled the data)*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran umum kondisi atau subyek studi guna mempertajam pembahasan dari aspek logika faktual dengan cara menginterpretasikan hasil pengolahan melalui tabulasi untuk memamerkan kecenderungan data empirik dan deskriptif seperti nilai *mean*. Analisis induktif digunakan untuk menguji dan menganalisis hipotesis penelitian dengan menggunakan uji beda dua rata-rata (uji t) (Subiyakto, 2001:89-116).

HASIL PENELITIAN

Menurut Badan Pusat Statistik (2009a:11-28), PDRB menurut metode produksi dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai produksi dari sembilan sektor produk, yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan

restoran; transportasi dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa pemerintahan

dan swasta. Berikut disajikan data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tabel 2.

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008
(jutaan Rupiah)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004
Kabupaten Banjarnegara	2.345.275,74	2.608.863,42	2.893.918,84	3.216.818,03
Kabupaten Banyumas	2.936.417,20	3.312.730,46	3.568.353,56	4.835.240,50
Kabupaten Batang	2.009.244,19	2.262.745,19	2.417.230,85	2.660.659,52
Kabupaten Blora	1.676.204,76	1.894.377,51	2.056.052,86	2.182.867,87
Kabupaten Boyolali	2.972.852,79	3.362.795,58	3.605.349,13	4.250.098,73
Kabupaten Brebes	3.759.435,47	4.371.289,34	4.775.607,36	5.986.162,75
Kabupaten Cilacap	11.495.506,55	13.249.229,62	15.014.901,73	19.151.057,28
Kabupaten Demak	2.122.941,05	2.401.370,94	2.742.021,68	3.149.386,40
Kabupaten Grobogan	1.927.338,42	2.163.014,96	2.418.069,22	3.160.711,85
Kabupaten Jepara	3.205.812,41	3.596.397,75	3.955.465,63	4.383.716,46
Kabupaten Karanganyar	2.812.235,12	3.161.318,40	3.518.510,69	5.038.378,68
Kabupaten Kebumen	2.375.750,56	2.678.124,79	2.965.531,76	3.060.653,43
Kabupaten Kendal	4.268.178,71	4.946.755,40	5.032.775,76	5.515.650,52
Kabupaten Klaten	3.352.245,32	3.891.798,65	4.290.006,98	5.475.849,75
Kabupaten Kudus	9.373.963,05	10.495.586,16	11.923.270,49	16.504.028,86
Kabupaten Magelang	3.016.149,76	3.364.521,02	3.755.812,34	4.119.373,21
Kabupaten Pati	2.841.667,34	3.242.399,20	3.398.763,01	4.648.350,18
Kabupaten Pekalongan	2.547.022,44	2.847.317,93	3.081.949,39	3.366.503,70
Kabupaten Pemalang	2.733.756,32	3.072.801,76	3.521.721,71	3.703.314,77
Kabupaten Purbalingga	1.712.131,99	1.904.743,38	2.123.063,35	2.564.077,55
Kabupaten Purworejo	2.118.182,23	2.415.435,73	2.662.839,21	2.951.647,48
Kabupaten Rembang	1.587.063,45	1.820.737,72	2.042.947,41	2.425.018,62
Kabupaten Semarang	3.146.855,44	3.555.861,85	3.916.833,27	5.683.406,80
Kabupaten Sragen	1.915.755,96	2.105.156,44	2.318.336,68	3.059.653,16
Kabupaten Sukoharjo	2.878.709,93	3.253.835,20	3.598.724,59	4.806.448,20
Kabupaten Tegal	2.387.368,89	2.741.527,97	3.049.391,05	3.421.779,18
Kabupaten Temanggung	1.856.728,10	2.083.511,61	2.294.872,22	2.541.689,78
Kabupaten Wonogiri	2.245.387,53	2.500.706,30	2.773.427,80	3.129.184,54
Kabupaten Wonosobo	1.492.578,11	1.687.100,38	1.850.751,84	2.063.216,41
Kota Magelang	836.823,84	968.104,21	1.074.495,79	1.145.458,89
Kota Pekalongan	1.506.321,86	1.707.354,27	1.925.403,30	2.058.516,21
Kota Salatiga	689.699,40	735.657,92	803.578,04	983.258,05
Kota Semarang	15.097.150,94	17.201.673,80	19.151.797,98	20.304.595,45
Kota Surakarta	3.321.685,50	3.703.510,33	4.177.490,76	4.756.559,52
Kota Tegal	948.945,79	1.094.418,48	1.197.448,69	1.278.884,13
JAWA TENGAH	111.515.387,16	126.404.775,67	139.898.717,97	167.584.220,46

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009b). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*.

lanjutan Tabel 2

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Kabupaten Banjarnegara	3.719.943,76	4.157.574,64	4.706.344,95	5.526.574,99
Kabupaten Banyumas	5.580.804,33	6.428.219,55	7.268.199,71	8.343.644,14
Kabupaten Batang	3.110.086,52	3.503.532,45	3.878.725,22	4.356.728,72
Kabupaten Blora	2.456.884,88	2.747.560,63	3.016.407,19	3.485.816,42
Kabupaten Boyolali	4.639.506,25	5.142.433,03	5.708.063,97	6.446.546,37
Kabupaten Brebes	7.325.401,19	8.402.057,26	9.550.916,48	11.134.037,66
Kabupaten Cilacap	19.612.368,78	23.034.934,91	25.452.312,00	30.238.836,31
Kabupaten Demak	3.532.942,95	3.977.180,32	4.337.087,88	4.931.378,19
Kabupaten Grobogan	3.560.401,73	4.019.497,49	4.558.277,12	5.185.205,33
Kabupaten Jepara	5.018.164,15	5.688.316,93	6.468.910,32	7.455.878,01
Kabupaten Karanganyar	5.611.289,49	6.187.781,85	6.904.990,47	7.679.675,36
Kabupaten Kebumen	3.502.841,33	4.082.249,01	4.568.870,87	5.304.522,46
Kabupaten Kendal	6.062.143,00	6.913.713,83	7.705.181,53	8.715.893,62
Kabupaten Klaten	6.520.828,29	7.504.499,43	8.349.253,36	9.491.601,49
Kabupaten Kudus	19.882.794,34	21.429.330,70	24.013.158,42	27.138.456,43
Kabupaten Magelang	4.640.401,55	5.252.845,83	5.859.048,24	6.587.626,47
Kabupaten Pati	5.200.371,82	6.033.083,05	6.717.815,82	7.705.219,45
Kabupaten Pekalongan	3.990.049,28	4.568.471,00	5.094.295,61	5.864.346,61
Kabupaten Pemalang	4.506.646,76	5.178.579,01	5.776.983,88	6.575.979,10
Kabupaten Purbalingga	2.912.447,31	3.408.083,52	3.887.240,54	4.444.058,18
Kabupaten Purworejo	3.443.170,90	4.094.294,69	4.660.785,05	5.328.179,09
Kabupaten Rembang	2.770.982,88	3.214.593,95	3.606.468,40	4.064.237,92
Kabupaten Semarang	6.484.472,47	7.340.034,64	8.175.899,23	9.284.507,64
Kabupaten Sragen	3.497.324,94	4.042.561,37	4.512.215,73	5.170.914,12
Kabupaten Sukoharjo	5.545.486,86	6.277.623,81	7.054.172,76	8.041.276,35
Kabupaten Tegal	3.836.595,41	4.418.701,80	5.535.534,32	6.406.970,01
Kabupaten Temanggung	2.816.682,42	3.210.684,17	3.645.351,52	4.125.938,98
Kabupaten Wonogiri	3.454.287,16	4.040.531,58	4.551.726,35	5.268.669,48
Kabupaten Wonosobo	2.309.638,85	2.630.137,88	2.962.993,79	3.332.061,77
Kota Magelang	1.288.556,23	1.359.997,00	1.478.242,77	1.669.909,26
Kota Pekalongan	2.400.562,15	2.727.184,42	2.993.816,01	3.251.123,80
Kota Salatiga	1.104.131,85	1.237.905,22	1.370.166,64	1.541.682,44
Kota Semarang	23.208.224,89	26.624.244,18	30.515.736,72	34.541.219,00
Kota Surakarta	5.585.776,86	6.190.112,55	6.909.094,57	7.901.886,06
Kota Tegal	1.450.041,15	1.660.905,62	1.870.352,12	2.139.214,57
JAWA TENGAH	190.584.257,73	216.731.463,32	243.666.646,56	278.681.823,80

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009b). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dihitung kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota

terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten/Kota Terhadap Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008 (%)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kabupaten Banjarnegara	2,10	2,06	2,07	1,92	1,95	1,92	1,93	1,98
Kabupaten Banyumas	2,63	2,62	2,55	2,89	2,93	2,97	2,98	2,99
Kabupaten Batang	1,80	1,79	1,73	1,59	1,63	1,62	1,59	1,56
Kabupaten Blora	1,50	1,50	1,47	1,30	1,29	1,27	1,24	1,25
Kabupaten Boyolali	2,67	2,66	2,58	2,54	2,43	2,37	2,34	2,31
Kabupaten Brebes	3,37	3,46	3,41	3,57	3,84	3,88	3,92	4,00
Kabupaten Cilacap	10,31	10,48	10,73	11,43	10,29	10,63	10,45	10,85
Kabupaten Demak	1,90	1,90	1,96	1,88	1,85	1,84	1,78	1,77
Kabupaten Grobogan	1,73	1,71	1,73	1,89	1,87	1,85	1,87	1,86
Kabupaten Jepara	2,87	2,85	2,83	2,62	2,63	2,62	2,65	2,68
Kabupaten Karanganyar	2,52	2,50	2,52	3,01	2,94	2,86	2,83	2,76
Kabupaten Kebumen	2,13	2,12	2,12	1,83	1,84	1,88	1,88	1,90
Kabupaten Kendal	3,83	3,91	3,60	3,29	3,18	3,19	3,16	3,13
Kabupaten Klaten	3,01	3,08	3,07	3,27	3,42	3,46	3,43	3,41
Kabupaten Kudus	8,41	8,30	8,52	9,85	10,43	9,89	9,85	9,74
Kabupaten Magelang	2,70	2,66	2,68	2,46	2,43	2,42	2,40	2,36
Kabupaten Pati	2,55	2,57	2,43	2,77	2,73	2,78	2,76	2,76
Kabupaten Pekalongan	2,28	2,25	2,20	2,01	2,09	2,11	2,09	2,10
Kabupaten Pemalang	2,45	2,43	2,52	2,21	2,36	2,39	2,37	2,36
Kabupaten Purbalingga	1,54	1,51	1,52	1,53	1,53	1,57	1,60	1,59
Kabupaten Purworejo	1,90	1,91	1,90	1,76	1,81	1,89	1,91	1,91
Kabupaten Rembang	1,42	1,44	1,46	1,45	1,45	1,48	1,48	1,46
Kabupaten Semarang	2,82	2,81	2,80	3,39	3,40	3,39	3,36	3,33
Kabupaten Sragen	1,72	1,67	1,66	1,83	1,84	1,87	1,85	1,86
Kabupaten Sukoharjo	2,58	2,57	2,57	2,87	2,91	2,90	2,90	2,89
Kabupaten Tegal	2,14	2,17	2,18	2,04	2,01	2,04	2,27	2,30
Kabupaten Temanggung	1,66	1,65	1,64	1,52	1,48	1,48	1,50	1,48
Kabupaten Wonogiri	2,01	1,98	1,98	1,87	1,81	1,86	1,87	1,89
Kabupaten Wonosobo	1,34	1,33	1,32	1,23	1,21	1,21	1,22	1,20
Kota Magelang	0,75	0,77	0,77	0,68	0,68	0,63	0,61	0,60
Kota Pekalongan	1,35	1,35	1,38	1,23	1,26	1,26	1,23	1,17
Kota Salatiga	0,62	0,58	0,57	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55
Kota Semarang	13,54	13,61	13,69	12,12	12,18	12,28	12,52	12,39
Kota Surakarta	2,98	2,93	2,99	2,84	2,93	2,86	2,84	2,84
Kota Tegal	0,85	0,87	0,86	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77

Sumber: Tabel 2. Data diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat dihitung rata-rata kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/

kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Rata-Rata Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008 (%)

Kabupaten/Kota	Rata-Rata	Kontribusi
Kabupaten Banjarnegara	1.99%	rendah
Kabupaten Banyumas	2.82%	rendah
Kabupaten Batang	1.66%	rendah
Kabupaten Blora	1.35%	rendah
Kabupaten Boyolali	2.49%	rendah
Kabupaten Demak	1.86%	rendah
Kabupaten Grobogan	1.81%	rendah
Kabupaten Jepara	2.72%	rendah
Kabupaten Karanganyar	2.74%	rendah
Kabupaten Kebumen	1.96%	rendah
Kabupaten Magelang	2.52%	rendah
Kabupaten Pati	2.67%	rendah
Kabupaten Pekalongan	2.14%	rendah
Kabupaten Pemalang	2.39%	rendah
Kabupaten Purbalingga	1.55%	rendah
Kabupaten Purworejo	1.87%	rendah
Kabupaten Rembang	1.46%	rendah
Kabupaten Sragen	1.78%	rendah
Kabupaten Sukoharjo	2.77%	rendah
Kabupaten Tegal	2.14%	rendah
Kabupaten Temanggung	1.55%	rendah
Kabupaten Wonogiri	1.91%	rendah
Kabupaten Wonosobo	1.26%	rendah
Kota Magelang	0.68%	rendah
Kota Pekalongan	1.28%	rendah
Kota Salatiga	0.58%	rendah
Kota Tegal	0.80%	rendah
Kabupaten Brebes	3.68%	tinggi
Kabupaten Cilacap	10.65%	tinggi
Kabupaten Kendal	3.41%	tinggi
Kabupaten Klaten	3.27%	tinggi
Kabupaten Kudus	9.37%	tinggi
Kabupaten Semarang	3.16%	tinggi
Kota Semarang	12.79%	tinggi
Kota Surakarta	2.90%	tinggi

Sumber: Tabel 3. Data diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dihitung pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota yang hasilnya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008 (%)

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kabupaten Banjarnegara	11,24	10,93	11,16	15,64	11,76	13,20	17,43	9,00
Kabupaten Banyumas	12,82	7,72	35,50	15,42	15,18	13,07	14,80	10,14
Kabupaten Batang	12,62	6,83	10,07	16,89	12,65	10,71	12,32	7,54
Kabupaten Blora	13,02	8,53	6,17	12,55	11,83	9,78	15,56	9,97
Kabupaten Boyolali	13,12	7,21	17,88	9,16	10,84	11,00	12,94	10,80
Kabupaten Brebes	16,28	9,25	25,35	22,37	14,70	13,67	16,58	12,56
Kabupaten Cilacap	15,26	13,33	27,55	2,41	17,45	10,49	18,81	14,52
Kabupaten Demak	13,12	14,19	14,86	12,18	12,57	9,05	13,70	8,17
Kabupaten Grobogan	12,23	11,79	30,71	12,65	12,89	13,40	13,75	11,17
Kabupaten Jepara	12,18	9,98	10,83	14,47	13,35	13,72	15,26	10,06
Kabupaten Karanganyar	12,41	11,30	43,20	11,37	10,27	11,59	11,22	9,10
Kabupaten Kebumen	12,73	10,73	3,21	14,45	16,54	11,92	16,10	10,38
Kabupaten Kendal	15,90	1,74	9,59	9,91	14,05	11,45	13,12	6,89
Kabupaten Klaten	16,10	10,23	27,64	19,08	15,09	11,26	13,68	9,13
Kabupaten Kudus	11,97	13,60	38,42	20,47	7,78	12,06	13,01	6,51
Kabupaten Magelang	11,55	11,63	9,68	12,65	13,20	11,54	12,44	8,55
Kabupaten Pati	14,10	4,82	36,77	11,88	16,01	11,35	14,70	8,84
Kabupaten Pekalongan	11,79	8,24	9,23	18,52	14,50	11,51	15,12	9,70
Kabupaten Pemalang	12,40	14,61	5,16	21,69	14,91	11,56	13,83	9,04
Kabupaten Purbalingga	11,25	11,46	20,77	13,59	17,02	14,06	14,32	15,24
Kabupaten Purworejo	14,03	10,24	10,85	16,65	18,91	13,84	14,32	9,78
Kabupaten Rembang	14,72	12,20	18,70	14,27	16,01	12,19	12,69	9,60
Kabupaten Semarang	13,00	10,15	45,10	14,09	13,19	11,39	13,56	8,45
Kabupaten Sragen	9,89	10,13	31,98	14,30	15,59	11,62	14,60	13,54
Kabupaten Sukoharjo	13,03	10,60	33,56	15,38	13,20	12,37	13,99	10,94
Kabupaten Tegal	14,83	11,23	12,21	12,12	15,17	25,28	15,74	10,64
Kabupaten Temanggung	12,21	10,14	10,76	10,82	13,99	13,54	13,18	9,13
Kabupaten Wonogiri	11,37	10,91	12,83	10,39	16,97	12,65	15,75	8,84
Kabupaten Wonosobo	13,03	9,70	11,48	11,94	13,88	12,66	12,46	7,65
Kota Magelang	15,69	10,99	6,60	12,49	5,54	8,69	12,97	11,55
Kota Pekalongan	13,35	12,77	6,91	16,62	13,61	9,78	8,59	6,65
Kota Salatiga	6,66	9,23	22,36	12,29	12,12	10,68	12,52	7,73
Kota Semarang	13,94	11,34	6,02	14,30	14,72	14,62	13,19	10,52
Kota Surakarta	11,49	12,80	13,86	17,43	10,82	11,62	14,37	12,39
Kota Tegal	15,33	9,41	6,80	13,38	14,54	12,61	14,37	11,62

Sumber: Tabel 2. Data diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 5, dapat dihitung rata-rata pertumbuhan PDRB masing-

masing kabupaten/kota yang hasilnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Rata-Rata Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008 (%)

Kabupaten/Kota	Rata-Rata	Pertumbuhan
Kabupaten Banjarnegara	12.54%	rendah
Kabupaten Batang	11.20%	rendah
Kabupaten Blora	10.93%	rendah
Kabupaten Boyolali	11.62%	rendah
Kabupaten Demak	12.23%	rendah
Kabupaten Jepara	12.48%	rendah
Kabupaten Kebumen	12.01%	rendah
Kabupaten Kendal	10.33%	rendah
Kabupaten Magelang	11.40%	rendah
Kabupaten Pekalongan	12.33%	rendah
Kabupaten Pemasang	12.90%	rendah
Kabupaten Temanggung	11.72%	rendah
Kabupaten Wonogiri	12.46%	rendah
Kabupaten Wonosobo	11.60%	rendah
Kota Magelang	10.57%	rendah
Kota Pekalongan	11.03%	rendah
Kota Salatiga	11.70%	rendah
Kota Semarang	12.33%	rendah
Kota Surakarta	13.10%	rendah
Kota Tegal	12.26%	rendah
Kabupaten Banyumas	15.58%	tinggi
Kabupaten Brebes	16.34%	tinggi
Kabupaten Cilacap	14.98%	tinggi
Kabupaten Grobogan	14.83%	tinggi
Kabupaten Karanganyar	15.06%	tinggi
Kabupaten Klaten	15.28%	tinggi
Kabupaten Kudus	15.48%	tinggi
Kabupaten Pati	14.81%	tinggi
Kabupaten Purbalingga	14.71%	tinggi
Kabupaten Purworejo	13.58%	tinggi
Kabupaten Rembang	13.80%	tinggi
Kabupaten Semarang	16.12%	tinggi
Kabupaten Sragen	15.21%	tinggi
Kabupaten Sukoharjo	15.38%	tinggi
Kabupaten Tegal	14.65%	tinggi

Sumber: Tabel 5. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 4 nampak kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terbesar untuk Provinsi Jawa Tengah masing-masing adalah Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang. Hal ini dapat dimengerti karena di Kabupaten Cilacap terdapat sumber tambang minyak bumi dan gas sedangkan di Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat pemerintahan dan sebagai pusat aktivitas kegiatan ekonomi untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masing-masing kabupaten/kota seperti yang disajikan pada Tabel 6 mengalami fluktuasi naik turun. Naik turunnya pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2001-2008 menunjukkan adanya mobilitas ekonomi di masing-masing kabupaten/kota yang berfluktuasi juga yang

tergantung pada strategi pengembangan wilayah masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan data pada Tabel 4 (Rata-Rata Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008) dan Tabel 6 (Rata-Rata Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008), dapat dilakukan pengujian statistik menggunakan uji beda dua rata-rata (Subiyakto, 2004) dengan nilai α ditetapkan sebesar 5%. Pengujian tersebut untuk membuktikan hipotesis penelitian. Hasil uji beda dua rata-rata ditunjukkan pada Tabel 7 dan Tabel 8 berikut ini:

Tabel 7
Uji Beda Dua Rata-Rata Kontribusi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Rendah dan Tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2001-2008

Nilai	Rata-Rata Kontribusi Rendah	Rata-Rata Kontribusi Tinggi
<i>Mean</i>	0.018802332	0.061540641
<i>Variance</i>	4.12239E-05	0.001658817
<i>Observations</i>	27	8
<i>Pooled Variance</i>	0.00038435	
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>Df</i>	33	
<i>t Stat</i>	-5.415603546	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	2.70486E-06	
<i>t Critical one-tail</i>	1.692360258	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	5.40971E-06	
<i>t Critical two-tail</i>	2.034515287	

Sumber: Tabel 4. Data diolah.

Tabel 8
Uji Beda Dua Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
(Rendah dan Tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,
Tahun 2001-2008

Nilai	Rata-Rata Pertumbuhan Rendah	Rata-Rata Pertumbuhan Tinggi
<i>Mean</i>	0.11837387	0.150530541
<i>Variance</i>	5.76448E-05	5.41441E-05
<i>Observations</i>	20	15
<i>Pooled Variance</i>	5.61597E-05	
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>Df</i>	33	
<i>t Stat</i>	-12.56277213	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	2.00493E-14	
<i>t Critical one-tail</i>	1.692360258	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	4.00985E-14	
<i>t Critical two-tail</i>	2.034515287	

Sumber: Tabel 6. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 8 dapat diringkas hasil pengujian hipotesis penelitian dengan uji Beda Dua Rata-Rata seperti yang nampak pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian
dengan Uji Beda Dua Rata-Rata

Hipotesis	<i>t test</i>	<i>P value</i>	Pengujian
H1	-5.415603546	5.40971E-06	signifikan (*)
H2	-12.56277213	4.00985E-14	signifikan (*)

Sumber: Tabel 7 dan Tabel 8.

Keterangan: (*) signifikan pada $\alpha = 0,05$.

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Perbedaan rata-rata kontribusi nilai PDRB antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang

mempunyai kontribusi rendah (28 kabupaten/kota) dan yang mempunyai kontribusi tinggi (7 kabupaten/kota). Kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata kontribusi PDRB rendah berarti kontribusi PDRB kabupaten/kota tersebut di bawah rata-rata kontribusi PDRB 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun. Kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata kontribusi PDRB tinggi berarti kontribusi PDRB kabupaten/kota tersebut di atas rata-rata kontribusi PDRB 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun. Dengan demikian, rendah tingginya rata-rata kontribusi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun menunjukkan besar kecilnya nilai kontribusi PDRB kabupaten/kota tersebut terhadap rata-rata kontribusi PDRB 35 kabupaten/kota. Oleh karena nilai PDRB merupakan PDRB yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) maka nilai rata-rata kontribusi PDRB kabupaten/kota rendah atau tinggi akan menunjukkan kecil atau besarnya nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (kabupaten/kota) dalam jangka waktu tertentu (selama

8 tahun).

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diterima. Perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai PDRB antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rendah (20 kabupaten/kota) dan yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB tinggi (15 kabupaten/kota).

Kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan PDRB rendah berarti laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota tersebut di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun. Kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan PDRB tinggi berarti laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota tersebut di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun. Dengan demikian, rendah tingginya rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah selama 8 tahun menunjukkan besar kecilnya laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota tersebut terhadap rata-rata laju pertumbuhan PDRB 35 kabupaten/kota. Oleh karena nilai PDRB merupakan PDRB yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) maka nilai rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota rendah atau tinggi akan menunjukkan kecil atau besarnya nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (kabupaten/kota) dalam jangka waktu tertentu (selama 8 tahun).

Oleh karena kedua hipotesis penelitian tersebut diterima maka perbedaan posisi antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Tipologi Klassen dan BCG *Matrix* menjadi benar karenanya. Berdasarkan Tipologi Klassen dan BCG *Matrix*, posisi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Posisi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Menurut Tipologi Klassen dan BCG *Matrix*, Tahun 2001-2008

Kabupaten/Kota	Tipologi Klassen	BCG <i>Matrix</i>
Kabupaten Banjarnegara	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Banyumas	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Batang	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Blora	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Boyolali	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Brebes	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Cilacap	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Demak	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Grobogan	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Jepara	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Karanganyar	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Kebumen	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Kendal	Daerah Maju Tetapi Tertekan	➔
Kabupaten Klaten	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Kudus	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Magelang	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Pati	Daerah Berkembang Cepat	?

Kabupaten Pekalongan	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Pemalang	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Purbalingga	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Purworejo	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Rembang	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Semarang	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	★
Kabupaten Sragen	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Sukoharjo	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Tegal	Daerah Berkembang Cepat	?
Kabupaten Temanggung	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Wonogiri	Daerah Tertinggal	☒
Kabupaten Wonosobo	Daerah Tertinggal	☒
Kota Magelang	Daerah Tertinggal	☒
Kota Pekalongan	Daerah Tertinggal	☒
Kota Salatiga	Daerah Tertinggal	☒
Kota Semarang	Daerah Maju Tetapi Tertekan	➔
Kota Surakarta	Daerah Maju Tetapi Tertekan	➔
Kota Tegal	Daerah Tertinggal	☒

Sumber: Tabel 4 dan Tabel 6. Data diolah.

Kabupaten/kota yang terletak pada kuadran satu (bergambar ? atau daerah berkembang cepat) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut mempunyai *share* rendah, tetapi laju pertumbuhan sektor tinggi. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran satu ini memiliki peluang pasar yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tinggi di kabupaten/kota ini. Dengan demikian, kabupaten/kota yang terletak pada kuadran satu ini berpotensi untuk dikembangkan. Strategi pengembangan kabupaten/kota ini adalah dengan menambah modal untuk meningkatkan jumlah produk (PDRB) yang dihasilkan oleh kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran dua (bergambar ☒ atau daerah maju dan cepat tumbuh) menunjukkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kontribusi tinggi. Dengan demikian, kabupaten/kota tersebut merupakan kabupaten/kota yang memiliki potensi berkembang, karena kabupaten/kota tersebut berada pada pasar yang memiliki laju pertumbuhan tinggi. Selain itu, kabupaten/kota itu juga memberikan kontribusi tinggi, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi. Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran dua adalah memperbesar permodalan untuk melayani permintaan dari laju

pertumbuhan pasar yang tinggi dan berusaha mempertahankan kontribusi yang telah dimiliki.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran tiga (bergambar ➔ atau daerah maju tetapi tertekan) merupakan kabupaten/kota yang berhasil, karena kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi yang tinggi, walaupun laju pertumbuhan relatif rendah. Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran tiga tidak memerlukan investasi besar. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan pasar juga relatif rendah. Jika diinginkan memperbesar investasi di kabupaten/kota tersebut, pemerintah kabupaten/kota harus berusaha menciptakan pasar atau mencari pasar baru bagi produk-produk di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/Kota yang terletak pada kuadran empat (bergambar * atau daerah tertinggal) dapat diartikan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki potensi yang rendah, karena kabupaten/kota tersebut memiliki pertumbuhan pasar rendah dan memberikan kontribusi yang rendah pula. Kabupaten/Kota tersebut memiliki tingkat keunggulan yang relatif rendah di dalam PDRBnya, sehingga kabupaten/kota tersebut hanya mampu menyerap sebagian kecil permintaan pasar. Investasi pada kabupaten/kota tersebut tidak dapat memberikan prospek yang baik, karena laju pertumbuhan kabupaten/kota tersebut juga rendah.

Strategi pengembangan kabupaten/kota yang berada pada kuadran empat adalah dengan melakukan diversifikasi produk untuk menciptakan pasar baru atau mencari pasar di luar pasar yang sudah ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan ada perbedaan rata-rata laju pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan rata-rata kontribusi nilai PDRB antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kontribusi rendah (28 kabupaten/kota) dan yang mempunyai kontribusi tinggi (7 kabupaten/kota). Perbedaan rata-rata pertumbuhan nilai PDRB antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa terdapat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rendah (20 kabupaten/kota) dan yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB tinggi (15 kabupaten/kota). Oleh karena ada perbedaan rata-rata kontribusi dan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (rendah dan tinggi) antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga mengakibatkan posisi masing-masing kabupaten/kota berbeda berada dalam 4 kemungkinan posisi, maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah perlu memilih strategi pengembangan wilayah yang berbeda pula.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka saran yang perlu disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota/Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 1) perlu memilih strategi pengembangan wilayah yang berbeda yang sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Saran ini disampaikan karena masing-masing kabupaten/kota mempunyai kekhasan wilayah yang bersangkutan (*endogenous*

development); 2) Perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung strategi pengembangan wilayah. Saran ini disampaikan karena semenjak pemberlakuan otonomi daerah, kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (Pusat) apalagi ketika Gubernur/Bupati/Walikota tidak berasal dari Partai Politik yang sama dengan Partai Politik yang mengusung Presiden terpilih sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan dari pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari dan Rudy Badrudin. 2003. "Strategi Pengembangan Kecamatan Menggunakan *Growth-Share Boston Consulting Group (BCG) Matrix* (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman, DIY)". *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol. 17, No. 3, Desember 2003: 203-213.
- Andriani, Lis, HR. 2001. "Analisis Strategi Perguruan Tinggi: Telaah Faktor Eksternal Dan Internal Sebagai Dasar Penentuan Posisi Keunggulan Kompetitif Dan Pemilihan Strategi: Kasus FE Jurusan Manajemen pada 9 Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Surabaya". *Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga*. Diakses dari <http://www.unair.ac.id>. tanggal 28 Februari 2011.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan: Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Bappeda DIY, 2010, *Laporan Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009a. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Tahun 2002-2008*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

- _____. 2009b. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009*. Badan Pusat Statistik. Semarang.
- Badrudin, Rudy. 2008. "Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Sleman". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No. 2, Desember 2008: 199-217.
- Bounds, Greg, *et al.* 1994. *Beyond Total Quality Management: Toward the Emerging Paradigm*. McGraw-Hill. Singapore.
- Hirawan, Susiyati Bambang. 2007. *Desentralisasi Fiskal sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pebruari 2007. Jakarta.
- Kompas, *Mekarnya Korupsi Daerah Pemekaran*, 2 Agustus 2010, hlm. 6.
- Maisyaroh, Arifa dan Debora Anggraini. 2005. "Kompetisi dan Strategi dalam Membangun Perguruan Tinggi pada Era Globalisasi". *Jurnal Manajemen STIE-MCE*. Vol. 12, No. 1, April 2005:17-26.
- Prasetyo, Yudo Agus. 2004. "Analisis Penetapan Strategi Perusahaan Guna Meningkatkan Daya Saing Pada PT Cipta Niaga Dengan Analisis SWOT". *Jurnal Kompilasi*. Diakses dari <http://www.musi.ac.id> tanggal 1 Juni 2011.
- Subiyakto, Haryono. 2001. *Statistika (Inferen) untuk Bisnis* Edisi 2. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[<http://www.kppod.go.id>]